

Artikel ini diambil dari : www.depkes.go.id

PEMERINTAH FOKUS CEGAH STUNTING DI 100 KABUPATEN/KOTA

DIPUBLIKASIKAN PADA : SABTU, 07 APRIL 2018 00:00:00, DIBACA : 6.404 KALI



Jakarta, 7 April 2018

Upaya pencegahan permasalahan *stunting*, gangguan pertumbuhan pada anak yang ditandai tinggi badan anak lebih pendek dari anak-anak lain dalam rentang usia yang sama, saat ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah.

Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo, pada Rapat Terbatas tentang penurunan *stunting* di Kantor Presiden Kamis lalu (5/4) menekankan, bahwa masalah *stunting* perlu menjadi perhatian bersama, sehingga upaya penurunan angka *stunting* membutuhkan kerja bersama yang harus melibatkan lintas sektor dan semua elemen masyarakat.

Fokus Cegah Stunting di 100 Kabupaten/Kota

Sejumlah langkah, sejak beberapa tahun belakangan sebenarnya telah dijalankan pemerintah untuk mencegah *stunting* di masyarakat, utamanya menambah asupan gizi bagi ibu hamil, Balita dan anak-anak sekolah.

"Sebetulnya sudah dimulai dari tiga tahun lalu dengan pemberian makanan tambahan atau PMT. Namun tahun ini, kita akan lebih menyasar dan fokus", ujar Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi (6/4).

Salah satu langkah inovasi yang saat ini tengah mulai diimplementasikan, yaitu dengan lebih memfokuskan program PMT di daerah-daerah yang memiliki angka *stunting* yang tinggi.

Program tersebut akan turut melibatkan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu di daerah setempat untuk mengencangkan sosialisasi pola hidup sehat dan menambah asupan makanan yang diberikan melalui program PMT yang dijalankan pemerintah pusat.

"Nanti akan kerja sama dengan PKK dan Posyandu untuk pemberian makanan tambahan baik berupa telur, ikan, kacang hijau, susu, juga tambahan biskuit

seperti kemarin. Intinya makanan lokal akan lebih didahulukan," ungkap Presiden.

Arahkan Sebagian Program Padat Karya untuk Perbaikan Gizi

Selain itu, Presiden juga mengarahkan agar sebagian program padat karya tunai untuk kesehatan, misalnya perbaikan sanitasi atau menangani perbaikan gizi anak di daerah-daerah yang saat ini menjadi fokus perhatian utama. Diharapkan, kondisi lingkungan dan derajat kesehatan di daerah-daerah sasaran dapat ditingkatkan untuk mencegah *stunting* sejak dini.

"Karena *stunting* ini bukan hanya masalah makanan, tapi juga berkaitan dengan kesehatan lingkungan baik sanitasi, infrastruktur air bersih, semuanya. Ini sebuah kerja yang harusnya sangat terintegrasi," tandas Presiden.

Padat Karya Tunai Desa Sektor Kesehatan

Saat ini, *stunting* menjadi salah satu masalah yang diperhatikan oleh pemerintah melalui sebuah inovasi yang diprakarsai Presiden Jokowi yang disebut Padat Karya Tunai Desa Bidang Kesehatan.

Program padat karya tunai desa merupakan program yang mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal, dan teknologi lokal desa. Program ini memiliki empat pilar, yaitu: 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat desa; 2) Menurunkan angka pengangguran masyarakat desa melalui kegiatan swa kelola, 3) Mekanisme operasionalnya dikerjakan bersama secara lintas sektor, dan 4) Dilaksanakan dengan integrasi lintas program dan lintas sektor.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor *hotline* 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat *email* [kontak\[at\]kemkes\[dot\]go\[dot\]id](mailto:kontak@kemkes.go.id).